



## BOCOR VAKSIN BOOSTER PAK GUBERNUR

“Itu sih ‘ke-terlalu-an’ menurut saya. Bagaimana mungkin para pejabat itu mendapatkan booster atau vaksin dosis ketiga, di tengah banyaknya warga yang belum mendapatkan vaksin sama sekali?”

**NASRULLAH**

**HERDIANSYAH**



### Kok Sampai Hati

**PENGAMAT** sosial budaya dari Universitas Muluwman, Nasrullah mempertanyakan empati para pejabat yang sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga.

Diam-diam para pejabat negara itu telah menggunakan jatah vaksin yang mestinya diprioritaskan untuk masyarakat dan tenaga kesehatan.

■ Baca Kok.. Hal 3

“Mau coba Vaksin Nusantara Pak Terawan, Pak”

“Saya juga sudah booster. tapi Moderna.”

“Siap, sudah”

Di tengah sulitnya masyarakat memperoleh vaksinasi COVID-19, sejumlah pejabat pusat dan daerah mengaku telah menerima suntikan vaksin booster atau dosis ketiga. Salah satunya Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. Politikus Nasdem ini mengaku telah menerima suntikan dosis ketiga Vaksin Moderna. Pengakuan mengejutkan itu terungkap dalam rekaman kunjungan Presiden Joko Widodo di Samarinda yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden.

**PEMBICARAAN** Isran Noor dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat pusat itu langsung mendapat reaksi negatif dari masyarakat.

■ Baca Bocor.. Hal 3

“Enggak, saya nunggu. Nunggu Pfizer.”

“Sudah booster semua, Pak. Pak Presiden belum, Pak?”

## DEFISIT SANA-SINI BERDALIH PANDEMI



**PENGACARA** Saud Purba menunjukkan sejumlah keganjilan dalam barang bukti cek kosong yang dialamatkan kepada Hasanuddin Mas'ud. Salah satunya soal specimen tanda tangan yang tak mirip.

**KUTAI TIMUR** – Hampir seluruh daerah di Kalimantan Timur melaporkan defisit anggaran. Kondisi ini sebenarnya bukanlah ‘barang’ baru. Sudah bertahun-tahun banyak daerah selalu melaporkan defisit dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahun ini, setelah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami defisit akut, giliran Kabupaten Kutai Timur melaporkan hal serupa.

Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang mengatakan, defisit pada APBD Perubahan 2020 akibat meningkatnya belanja daerah serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Penyesuaian terpaksa dilakukan Pemkab Kutim pada APBD Perubahan kali ini. Beberapa kebutuhan harus direalokasi.

“Kami melihat evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. Kemudian menyempurnakan kebijakan melalui optimalisasi program. Serta melihat perkembangan yang terjadi pada semester pertama,” ucap Kasmidi.

Hasilnya, diperoleh angka defisit sebesar Rp 267

miliar. Kenaikan belanja daerah disebabkan belanja langsung seperti menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta penyelesaian utang atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Utang untuk membayar pekerjaan fisik, sebagian tanah dan sebagian utang DBH-DR,” jelasnya.

■ Baca Tanda.. Hal 3

## Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 468,1 Triliun

**JAKARTA** - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menarik utang baru sebesar Rp 468,1 triliun hingga akhir Juli 2021. Angka tersebut sudah mencapai 39,8 persen dari target keseluruhan tahun ini Rp 1.177,4 triliun.

Realisasi pembiayaan utang tersebut tercatat turun 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu tercatat Rp 518 triliun.

“Pembiayaan utang yang mencapai Rp 468,1 triliun atau 39,8 persen dari target,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (25/8).

Secara rinci, pembiayaan utang terdiri dari penerbitan SBN yang mencapai Rp 487,4 triliun, turun 5,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan sudah memenuhi 40,4 persen dari target pener-

bitan SBN mencapai Rp 1.207,3 triliun.

Selanjutnya, pinjaman secara neto Rp 19,4 triliun. Angka ini sudah mencapai 64,8 persen dari target APBN yang sebesar Rp 29,9 triliun. Sementara pembiayaan sebesar Rp 26,3 triliun, naik 194,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun realisasi pembiayaan dalam lima bulan pertama tersebut didominasi oleh penerbitan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN), dan sebagian kecil dari pinjaman dalam dan atau luar negeri.

Sementara itu, untuk pemberian pinjaman sudah terealisasi Rp 1,6 triliun atau sudah memenuhi pagu 354,4 persen dengan pertumbuhan 10,5 persen. Untuk pembiayaan lainnya tercatat Rp 26,7 triliun miliar atau sudah memenuhi 169,5 persen terhadap pagu APBN Rp 15,8 triliun

■ Baca Pemerintah.. Hal 2



SRI Mulyani.

## Tandatangan Beda

**SAMARINDA** - Calon Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud dan istrinya, memenuhi panggilan Satreskrim Polresta Samarinda. Keduanya menjalani pemeriksaan kasus dugaan penipuan cek bodong pada Selasa (24/8) malam.

Menurut Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Iptu Teguh Wibowo, pemeriksaan berlangsung sekitar tiga jam.

“Pemeriksaan seputar kaitan antara pelapor dengan terlapor. Kenal atau tidak, penyerahan cek itu ada apa tidak, lalu terkait permasalahan utang-piutang dan seterusnya,” kata Teguh Wibowo.

la tak bersedia menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap kedua terlapor.

■ Baca Tandatangan.. Hal 2

Menjerit karena Defisit



Kota Balikpapan  
**Rp 412 M**  
(Rancangan APBD Perubahan 2022)

Kab. Kutai Kartanegara  
**Rp 488 M**  
(APBD 2020)

Kota Samarinda  
**Rp 111 M**  
(APBD 2021)

Prov. Kaltim  
**Rp 1 triliun**  
(APBD Perubahan 2021)

Kab. Kutai Timur  
**Rp 267 M**  
(APBD Perubahan 2021)

Kab. Kutai Timur  
**Rp 267 M**  
(APBD Perubahan 2021)

Kab. PPU  
**Rp 550 M**  
(APBD 2021)

## Kisah ‘Penjaga Irama’ Menghajar Mick Jagger

Penabuh drum, Charlie Watts, yang meninggal dunia di usia 80 tahun, meletakkan pondasi yang menopang keberhasilan musik grup legendaris Rolling Stones.

**KELOMPOK** musik ini menjadi buah bibir bagi kelebihan dari warna musik

rock ‘n’ roll, tapi bagi Watts, bermain dengan Stones tak menjadikannya sebagai perjalanan ego yang memunculkan nama Mick Jagger dan Keith Richards.

Sebagai penggila jazz, Watts bersaing dengan Bill Wyman untuk mendapatkan gelar sebagai anggota band yang tidak menonjol: dia menghindari pusat perhatian dan jarang memberikan wawancara.

Dan dia terkenal menggambarkan hidup lima tahun bermain dengan Stones, dan selama 20 tahun berkelana bersamanya.

Charles Robert Watts lahir 2 Juni 1941 di RS Universitas College di London, dan besar di Kingsbury, sekarang bagian dari London Borough of Brent.

Ayahnya seorang sopir truk, dan Watts besar di rumah prefab, di mana keluarganya pindah setelah Jerman

menjatuhkan bom yang meluluhlantakan ratusan rumah di daerah tersebut.

Seorang teman masa kecil pernah menceritakan bagaimana awal mula Watts tertarik dengan jazz, dan menengak soal menikmati alunan lagu dari piringan hitam 78s di kamar Charlie dengan alunan lagu dari para seniman seperti Jelly Roll Morton dan Charlie Parker.

■ Baca Kisah.. Hal 2



CHARLIE WATTS



Memutus Lingkaran Setan Bisnis Padi



Cegah Demo ASN, Bupati PPU Tebar Ancaman



Wacana Kutim Tambal APBD: Pajak Kendaraan Luar Daerah



Emosi Membara, Rumah Kerabat di Tenggarong Dibakar



# PPKM LEVEL 4 DIPERPANJANG LAGI

SAMARINDA – Pemerintah Kalimantan Timur menerbitkan peraturan pelaksanaan PPKM Level 4 dan PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 dalam menangani COVID-19.

Selain tiga aturan itu, Pemprov juga mengatur kegiatan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan.

Aturan dikeluarkan berdasarkan assesmen Kementerian Kesehatan dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terkait pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerah.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kaltim M Syafruddin menjelaskan kedua Ingub mengatur pelaksanaan PPKM di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim yang berlaku 24 Agustus hingga 6 September 2021.

"Kedua Ingub terkait PPKM berlaku selama 14 hari. Ingub sebagai tindaklanjut Inmendagri sesuai asesmen Kement-

terian Kesehatan," jelas Ivan, panggilan akrab bagi Juru Bicara Pemprov Kaltim ini.

Pelaksanaan PPKM level 4 dan level 3 kali ini, lanjutnya, tetap berlaku untuk masing-masing 5 daerah. "Penetapan level berdasarkan situasi dan perkembangan pandemi di daerah yang dilaporkan melalui aplikasi Silacak Kementerian Kesehatan," sebutnya.

Ivan menyebutkan lima daerah berlaku level 4, yakni Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser.

Sementara kabupaten dan kota di level 3, yakni Bontang, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Berau dan Mahakam Ulu yang tidak berubah kriteria.

"Inti pelaksanaan PPKM ini, selain mengatur kegiatan di masyarakat, juga disiplin protokol kesehatan dan optimalisasi 3T (testing, tracing dan treatment)," ungkap Ivan dalam pernyataannya. **\*PRO/YOS**



Satgas Penanganan COVID-19 melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas di Samarinda. Pemprov Kaltim resmi memperpanjang PPKM Level 4 di 5 daerah. DOKUMENTASI

## DEFISIT

Sambungan halaman 1

Kemudian Pemkab Kutim juga membuat program baru. Yaitu memberikan bantuan pembayaran rekening PDAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah selama 3 bulan.

Ditambah dengan kegiatan penanganan COVID-19. "Bentuknya berupa jaring pengaman sosial, dan menggerakkan serta pemulihan ekonomi daerah," bebernya.

Sebenarnya, Pemkab Kutim telah menyusun rencana pembangunan tahun ini. Arahnya dengan peningkatan produk unggulan yang memiliki daya saing. Hanya saja kebijakan tersebut terpaksa menguap.

Kondisi pandemi menjadi biang kerok kegagalan program itu. Ditambah lagi, keharusan Pemkab memperhatikan kondisi ekonomi. "Sehingga perlu dilakukan realokasi dan refocusing belanja daerah. Dan saat diubah pun harus terjadi kondisi defisit," katanya.

Namun Pemkab Kutim sudah memiliki langkah antisipasi. Salah satunya dengan memasukkan penerimaan tambahan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya coba ditambah menjadi pembiayaan. "Nilainya sebesar Rp 272,6 miliar. Jika bisa diproyeksikan dan terpakai maka dapat menutupi defisit anggaran ini," tuturnya.

Tahun ini sebenarnya Pemkab Kutim menerima transfer pusat dengan jumlah cukup besar. Berdasarkan data daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021, Kutim mendapat kurunan Rp 2,1 triliun.

Dana itu merupakan akumulasi dari Dana Bagi Hasil (Rp 1,1 triliun), Dana Alokasi Umum (Rp 577 miliar), Dana Alokasi Khusus Fisik (Rp 130 miliar), Dana Alokasi Non-Fisik (Rp 105 miliar), dan Dana Desa (Rp 194 miliar). Tahun ini, Kutim tak mendapatkan Dana Insentif Daerah.

## CICIL INSENTIF

Salah satu dampak kekurangan anggaran dirasakan para ASN di Pemkab PPU. Mereka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tertahan selama hampir 4 bulan. Demi meredakan rencana unjukrasa, Pemkab berencana melakukan pembayaran secara bertahap.

Titik terang itu diungkapkan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir. Menyatakan per kemarin, proses pembayaran sudah dijalankan.

"Kami bayar selama 1 bulan dulu. Untuk yang berikutnya akan dibayarkan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita," ujarnya, Rabu (25/8).

Diketahui, ada ribuan PNS yang belum menerima insentif itu sejak Mei lalu. Jadi menunggak sekira 3 bulan. Akibat terlambatnya pembayaran itu, terdengar pula gerakan demonstrasi bakal ditunjukkan jajaran abdi negara. Namun hingga kini unjuk rasa itu belum juga terealisasi.

Muhajir menerangkan hambatan pemerintah terlambat membayar hak pegawai itu. Alasannya tak lain tak bukan ialah kondisi keuangan sulit saat ini.

"Karena kita ketahui bersama. Alasannya banyak. Terkait penurunan DBH (Dana Bagi Hasil) juga iya, kemudian alokasi banyak terserap untuk membiayai pandemi COVID-19," ungkapnya.

Hal itu, sambungnya, masih juga dibebani berbagai kebijakan pemerintah pusat. Yaitu pengalihan beban berbagai pembiayaan.

"Sehingga alokasi itu membuat daerah mengalokasikan lagi, karena itu menjadi kewajiban daerah. Dulunya itu kewajiban pusat," katanya.

Salah satunya ialah pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan (nakes). Yang sejak tahun lalu juga belum diberikan. Pemkab PPU juga mengakui kesulitan untuk melakukan pembayaran terhadap ratusan nakes yang menangani COVID-19 itu.

"Jadi terkadang pemerintah pusat itu mengeluarkan kebijakan itu memberatkan daerah," tutup Muhajir. Awal tahun ini PPU telah mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 500 miliar.

Rencana itu dilakukan mengingat defisit dialami pemerintah daerah mencapai Rp 550 miliar. Selain Kutim dan PPU, Kota Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara juga melaporkan nasib serupa. **\*BCT/RSY/YOS**

## BOCOR

Sambungan halaman 1

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban mempertanyakan pengakuan para pejabat publik yang sudah menerima booster vaksin.

"Bagaimana bisa. Beberapa orang memiliki akses amat mudah untuk mendapatkan vaksin, bahkan vaksin dosis ketiga, sementara masyarakat berdiri dalam antrian panjang selama berjam-jam untuk dosis pertama. Itu pun kalau kebagian. Pesan: jangan terus-terusan memperdalam kesenjangan," katanya.

Menanggapi laporan bahwa beberapa pejabat pemerintah telah menerima vaksin ketiga sebagai booster, Deputy Direktur Amnesty International Indonesia Wiryu Adiwena menyatakan program vaksinasi COVID-19 harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia.

"Dengan persediaan vaksin yang masih terbatas, pemerintah seharusnya memprioritaskan tenaga medis dan kelompok-kelompok masyarakat paling rentan terpapar termasuk lansia, masyarakat miskin, penyandang difabel, hingga mereka yang berada di tahanan – bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa."

Amnesty mengutip data Kemenkes per tanggal 25 Agustus, baru 33,39 persen dari tenaga kesehatan yang telah menerima vaksin booster. Sementara baru 16,93 persen lansia dan 5,72 persen dari masyarakat rentan dan umum yang telah menerima vaksin kedua.

"Memberikan vaksin ketiga kepada pejabat dalam situasi seperti ini tidak bisa dibenarkan dan mencerminkan ketidakpedulian pihak berkuasa atas kebutuhan publik."

"Kami mendesak pemerintah untuk memastikan vaksinasi tidak diberikan berdasarkan jabatan atau kekuasaan, melainkan diprioritaskan untuk mereka yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar COVID-19, termasuk tenaga kesehatan."

"Pemerintah juga perlu memastikan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara akuntabel dan transparan," imbuh Wiryu Adiwena

Sementara kelompok relawan yang tergabung dalam platform LapoCovid dalam pernyataan resmi mengatakan booster Vaksin Moderna yang didapatkan non-tenaga kesehatan menciderai rasa keadilan.

"Praktik seperti ini menunjukkan sikap pejabat publik yang serakah,"

## KOK

Sambungan halaman 1

Menurut Nasrullah, sudah banyak rakyat gugur di tengah pandemi ini. Baik yang sudah divaksin maupun yang belum. Mestinya, menurut Nasrullah, para pemimpin mampu merasakan empati terhadap nasib rakyat yang sedang kesulitan dan menderita di tengah krisis pandemi ini. "Kok bisa sampai hati seperti demikian?"

Kesannya jadi seperti 'diam-diam' menyelamatkan diri di tengah jatuh bangun rakyatnya yang sedang berperang. Bahkan sampai banyak yang berguguran," tuturnya, kepada Disway Kaltim, Rabu (25/8).

Nasrullah mengatakan, sejauh yang

tulis komunitas yang dibentuk berbagai kalangan itu.

Mereka juga mendesak agar Presiden Jokowi tidak mengikuti vaksin booster. "Bila Presiden melakukan vaksin dosis ketiga, berarti Bapak memberikan contoh/membenarkan para kepala daerah, pejabat, TNI/Polri, politisi, pengusaha, dan non-nakes lainnya untuk mendapatkan booster," tulisnya dalam akun @LapoCovid yang ditautkan langsung ke akun presiden @jokowi.

"Sekali lagi, kami memohon agar Presiden @jokowi memberikan contoh bagi kita semua, dan mendahulukan vaksin untuk booster tenaga kesehatan dan vaksin untuk mereka yang belum sama sekali menerimanya."

"Jangan sampai membuat keputusan keliru, Bapak Presiden @jokowi!"

## PEJABAT YANG SUDAH TERIMA BOOSTER VAKSIN

Dalam rekaman yang sempat diunggah Sekretariat Presiden terungkap sejumlah pejabat sudah mendapat suntikan dosis ketiga atau vaksin booster COVID-19.

Mulanya video itu menampilkan momen ketika Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SMPN 22 Samarinda, Selasa (24/8).

Presiden didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Isran Noor, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Di sela-sela meninjau proses vaksinasi, sebelum Jokowi melakukan video conference, para pejabat tersebut terlihat tengah berbicara-bincang dan terdengar dalam video.

Para pejabat tersebut terlibat percakapan mengenai Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hingga vaksin booster.

CNN Indonesia yang pertama kali menyiarkan berita ini menyebut Wali Kota Andi Harun mulanya mengaku sudah mendapat dua suntikan vaksin. Ia berencana mendapat Vaksin Nusantara. Jokowi menanggapi hal tersebut dengan sedikit bercanda.

"Oh, pantes segar benar. Mendahului kita ini Pak Wali Kota," kata Jokowi sambil terkekeh. Jokowi kemudian bertanya apakah Andi sudah mendapat Vaksin Nusantara.

Namun, menurut Andi, ia belum disuntik Vaksin Nusantara dan ingin mencoba. Kemudian, Jokowi bertanya kepada Panglima TNI Hadi Tjahjanto apakah

sudah menerima Vaksin Nusantara.

"Siap, sudah," jawab Panglima.

"Pada enggak ngajak-ngajak kita ya," balas Jokowi.

Usai membicarakan Vaksin Nusantara, perbincangan beralih mengenai suntikan vaksin booster. Gubernur Isran Noor yang mulanya membuka percakapan mengenai hal ini.

Awalnya, Isran mempertanyakan apakah Panglima sudah mendapatkan vaksin booster. Panglima kembali menjawab sudah mendapatkan vaksin booster, namun tidak terdengar jelas vaksin yang digunakan.

Sementara, Isran mengaku dia sudah mendapatkan vaksin booster. "Saya juga sudah booster, tapi Moderna," kata Isran.

Menteri Pertahanan Prabowo kemudian menimpali dan bertanya kepada Presiden Jokowi apakah sudah mendapat vaksin booster atau belum.

"Sudah booster semua, Pak. Pak Presiden belum, Pak? tanya Prabowo.

Jokowi kemudian menjawab dengan, "enggak, saya nunggu. Nunggu Pfizer."

Berdasarkan pernyataan Kemenkes pada 13 Agustus 2021, selain untuk vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan (nakes), Vaksin Moderna diberikan kepada peserta yang belum pernah mendapatkan vaksinasi COVID-19.

"Kami menghimbau kepada pemerintah daerah untuk memberikan vaksin merek Moderna sebagai dosis ketiga hanya kepada nakes. Selain untuk nakes, vaksin COVID-19 Moderna juga diperuntukkan bagi publik, khususnya ibu hamil dan masyarakat yang memiliki komorbid, yang belum pernah mendapatkan vaksinasi sama sekali," terang dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI.

Pada Surat Edaran HK.02.01/1/1919/2021, Kemenkes menjelaskan bahwa vaksinasi dosis ketiga bagi nakes dapat menggunakan vaksin dengan platform yang sama (Sinovac) atau platform yang berbeda (Moderna), dengan interval minimal pemberian vaksinasi dosis ketiga adalah 3 bulan setelah dosis kedua diberikan.

Khusus bagi masyarakat yang belum pernah menerima vaksinasi, vaksin COVID-19 Moderna diberikan sebanyak 2 (dua) dosis dengan interval 4 minggu, sehingga vaksin yang dialokasikan pada minggu ke 2 Agustus 2021 ini untuk memenuhi kebutuhan 2 (dua) dosis sekaligus.

Sementara itu, vaksinasi bagi ibu hamil yang dimulai per 2 Agustus 2021 itu direkomendasikan untuk ibu hamil dengan prioritas pada daerah risiko tinggi. Vaksin yang direkomendasikan

selain Moderna adalah Pfizer dan Sinovac sesuai ketersediaan.

Untuk pemberian dosis satu vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dimulai pada trimester kedua kehamilan, dan untuk pemberian dosis kedua dilakukan sesuai dengan interval dari jenis vaksin yang diberikan. Misalnya untuk vaksin merek Moderna, interval dosis 1 dan 2 adalah 4 minggu.

Selain Moderna yang khusus digunakan sebagai vaksin booster, vaksin lain yang dikelola pemerintah dan bisa didapat oleh masyarakat adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Novavax, dan vaksin yang masuk program Gotong Royong.

Sementara Vaksin Nusantara di luar ketentuan pemerintah dan hingga saat ini belum mendapatkan izin edar atau izin uji klinis. Vaksin ini tidak masuk dalam program vaksinasi nasional.

BPOM menyatakan vaksin yang diprakarsai mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto itu sudah disepakati tidak untuk pengembangan vaksin massal, melainkan hanya menjadi riset dan playanan.

Putusan itu disahkan melalui nota kesepahaman atau MoU yang diteken BPOM, Kemenkes, dan TNI AD pada 19 April 2021.

## JANGKAUAN VAKSINASI DI KALTIM

Ketika Gubernur Isran Noor menyatakan sudah menerima vaksin booster, ternyata masih banyak tenaga kesehatan yang belum menerima.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, sampai malam tadi baru 9.887 nakes atau SDM (Sumber Daya Manusia Kesehatan) yang menerima vaksin booster.

Angka itu masih jauh dari jumlah nakes yang berhak menerima suntikan dosis ketiga, yakni sebanyak 29.933 orang.

Selain itu, dari seluruh sasaran vaksinasi sebanyak 2,8 juta orang, baru 688.328 warga menerima suntikan dosis kesatu, atau 23,95%. Sedangkan warga yang sudah memperoleh vaksin dosis kedua baru 445.464 orang, atau sekitar 15,50%.

Dalam pernyataan di depan Presiden Jokowi, Isran Noor mengklaim Kaltim terus melakukan akselerasi vaksinasi di sentra-sentra vaksinasi.

Ia juga meminta pemerintah pusat mengalokasikan vaksin di Kaltim lebih banyak. "Dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan dosis ke 2 dan incident rate tertinggi di luar Jawa Bali," kata Isran Noor dalam sambutan tertulis. **\*DAS/CNI/YOS**

sis ketiga, di tengah banyaknya warga yang belum mendapatkan vaksin sama sekali?" ucap Herdiansyah.

Ia mengatakan, di Kalimantan Timur sendiri, presentase vaksinasi COVID-19 masih kecil. Lantas ternyata Gubernurnya telah mendapat suntikan vaksin sampai tiga kali.

Apalagi, ia menambahkan, vaksin booster seharusnya diprioritaskan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu. Sebagai barisan depan berjuang melawan pandemi. Hal tersebut, kata Herdiansyah sebagaimana yang pernah disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

"Jadi ini membuka topeng para pejabat kita yang ternyata lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding rakyatnya," pungkasnya. **\*DAS/YOS**